DIPLOMATIKA: JURNAL KEARSIPAN TERAPAN
2022, VOL. 5, NO. 2, 120 - 132

# Dari Administrasi Perkantoran ke *Recordkeeping Informatics*: Sebuah Proposal untuk Transformasi Digital Organisasi Pengelola arsip

**Harry Bawono**

Badan Riset dan Inovasi Nasional

**ABSTRACT**

In 2018, the Indonesian government issued a presidential regulation on electronic governance. Based on this regulation, the government identifies digital records and archives management as one of the domains that need to be highlighted. This situation has become more pressing since the government announced plans to build a new capital city in Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. The new capital city is named Nusantara. Government set to implement the integrated smart city concept in this city. As a result, the records and archives management organization has to transform to handle digital records and archives produced in this new capital city in the near future. The key concept used as a reference in this study is cybernetics, developed by a well-known sociologist, Talcott Parsons. This study aims to define the concept of digital transformation of records and archives management organizations in Indonesia's new capital city, Nusantara. This study conducted from January to December 2020. This study employed a qualitative approach, with literature reviews and focus group discussions (FGD). According to the findings of this study, digital transformation of records and archives management organizations needs to be carried out by changing the government's perspective on records and archives, the function of archival organizations, and records and archives management practices

Submitted: 22/11/2022
Received: 25/03/2023

***Correspondence:**
Harry Bawono
harry.bawono@brin.go.id

**KEYWORDS:**
Cybernetics

digital transformation

e-government

capital city of nusantara

records and archives management organization

**INTISARI**

Pemerintah Indonesia meluncurkan peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2018. Peraturan ini menjadikan pengelolaan arsip digital sebagai salah satu domain yang disoroti. Kondisi tersebut semakin mendesak sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Ibu kota baru yang dinamakan sebagai Nusantara ini direncanakan mengimplementasikan konsep kota pintar terintegrasi. Karenanya organisasi pengelola arsip perlu bertransformasi untuk dapat segera menangani arsip digital yang dihasilkan di ibu kota nusantara. Konsep utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sibernetika yang dikembangkan oleh sosiolog, Talcott Parsons. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep transformasi digital organisasi pengelola arsip yang kontekstual dengan Indonesia, khususnya ibu kota nusantara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan focus group discussion (FGD). Penelitian ini menemukan bahwa transformasi digital terhadap organisasi pengelola arsip perlu dilakukan dengan mengubah perspektif pemerintah dalam melihat arsip, fungsi organisasi kearsipan dan praktek pengelolaan arsip.

**KATA KUNCI:**
ibu kota nusantara

organisasi pengelola arsip

sibernetika

sistem pemerintahan berbasis elektronik

transformasi digital

**CITE THIS ARTICLE:**
Bawono, H. (2022). Dari Administrasi Perkantoran ke *Recordkeeping Informatics*: Sebuah Proposal untuk Transformasi Digital Organisasi Pengelola arsip. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan, 5(2),* 120-132. http://dx.doi.org/10.22146/diplomatika.79333

**PENDAHULUAN**

Rencana pemindahan ibukota ini mendorong kembali diskusi mengenai urgensi pengelolaan arsip digital, mengingat Ibukota Negara Baru (IBU KOTA NUSANTARA) ini dikonsepkan sebagai *full integrated smart city* (Deny, 2019). Pembangun IBU KOTA NUSANTARA ini dipandang sebagai momentum untuk sekaligus totalitas dalam pengembangan pengelolaan arsip digital. Konsep *smart city* yang bertalian pula dengan konsep SPBE pada dasarnya bertemali pula dengan konsep pengelolaan arsip digital. Infrastruktur informasi yang masif dan muktahir dalam menjalankan SPBE yang menjadi mesin *smart city* mensyaratkan sebuah metode pengelolaan informasi yang mumpuni. Sederhananya, segala informasi yang tercipta dan terkelola di IBU KOTA NUSANTARA dapat tetap tersimpan, diakses, dan dimanfaatkan lintas generasi, lintas waktu.

Pengelolaan arsip membutuhkan organisasi. Karena organisasi inilah yang menjalankan fungsi pengelolaan arsip digital. Fungsi ini menjadi bagian dari keseluruhan sebuah induk organisasi dalam menjalankan fungsi utamanya. Tanpa organisasi atau pengorganisasian, pengelolaan arsip digital tentu akan terbengkalai karena ada ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola pengelolaan arsip digital ini. Mengingat pentingnya posisi organisasi atau pengorganisian ini, lembaga sekelas National Archives (Arsip Nasional Inggris Raya) menerbitkan regulasi dalam bentuk pedoman penyusunan organisasi untuk menyokong pengelolaan arsip (The National Archives, 2010).

Tidak sekedar ada, namun sejauhmana kemudian organisasi tersebut kontekstual dalam arti seusai dengan konteks lingkungan digital yang dikembangkan dalam IBU KOTA NUSANTARA. Masalah ini menjadi penting karena dominasi perspektif administratif saat ini terbukti kurang peka terhadap perubahan lingkungan yang sudah terjadi sedemikian rupa. Meskipun, wacana dan program transformasi digital kearsipan telah bergulir sejak 2018 dan digadang-gadang sebagai gerakan percepatan menuju pengelolan arsip digital namun kerangka pikir dominan yang digunakan masih administratif-sentris. Dalam perspektif ini, arsip digital mengalami penyempitan sedemikian rupa dalam wujud persuratan atau naskah dinas digital. Jika kondisi ini terus bertahan tanpa ada perspektif alternatif yang kontekstual dengan zaman, maka dapat diprediksi bahwa organisasi-organisasi pengelola arsip saat ini yang ada diberbagai organisasi, khususnya pemerintah, hanya akan menangkap arsip fasilitatif korespondensi. Sementara, arsip substantif yang telah tercipta berpotensi tidak terkelola secara layak.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah "bagaimana konsep transformasi digital organisasi pengelola arsip yang kontekstual dengan konsep IBU KOTA NUSANTARA?" Dari pertanyaan maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep transformasi digital pengorganisasian arsip yang kontekstual dengan konsep IBU KOTA NUSANTARA.

Untuk menjawa pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan beberapa konsep, yaitu: arsip digital dan pengelolaan arsip digital, organisasi kearsipan, sibernetika parsons, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arsip digital dan pengelolaan arsip digital. Dalam ISO 15489-1:2016, arsip atau record didefinisikan sebagai *information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business*. Dari konsepsi ISO ini, ada 8 kata kunci, informasi, aset, obligasi legal dan transaksi bisnis. Sementara itu, secara spesifik, arsip elektronik dapat dikonsepkan sebagai arsip yang lahir secara digital contohnya di dalam sistem informasi berbasis komputer dan atau arsip yang lahir dalam format lain hasil digitisasi (Duranti, 2001; Borglund E. A., 2007; Borglund E. , 2008).

Sistem yang mengelola arsip ini kemudian disebut sebagai sistem pengelolaan arsip. Sistem Pengelolaan Arsip Digital/Elektronik adalah sebuah program komputer atau seperangkat program komputer yang digunakan untuk mengelola arsip yang tersimpan di dalam database terkait (Kingdon, 2012). Sistem pengelolaan ini mulai dari melakukan pengendalian akses, auditing dan juga proses pemusnahan (Kingdon, 2012). Karena arsip sebagai sebuah proses adalah mekanisme penciptaan, perekaman dan pengelolaan serta pemusnahan informasi maka dia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagi basis infrastrukturnya (Sundberg & Wallin, 2007).

Arsip digital berbeda sifat dengan arsip non-digital. Menurut Bearman dan Cook, arsip digital tersusun oleh komposisi bahasa algoritmik, dengan begitu maka harus diperlakukan dengan cara sekaligus paradigma yang berbeda dengan arsip non-digital atau berbasis kertas (Bearman, 1993; Cook, 2007).

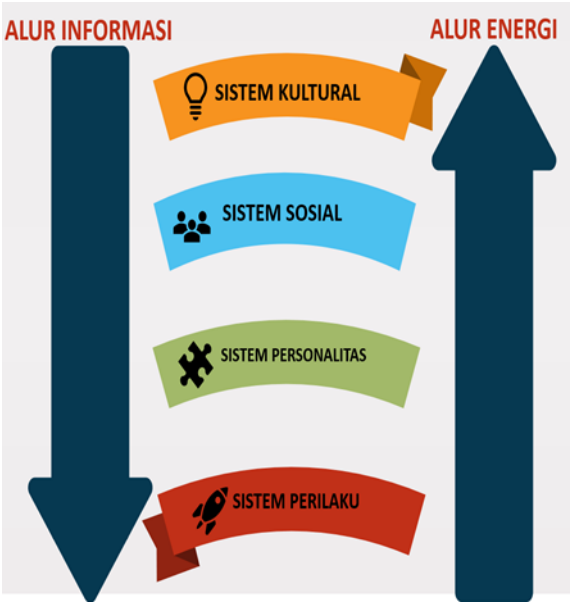
Tantangan terbesar dalam mengelola arsip elektronik/digital adalah mengubah paradigma kertas-sentris yang hingga saat ini masih kerap digunakan ketika mengelola arsip elektronik/digital menjadi paradigma digital-sentris (Cook, 2007). Perubahan paradigma atau perspektif ini penting karena ketika kondisi ini terus menerus berlanjut maka dapat menghambat pengelolaan arsip elektronik/digital (Duranti, 2001). Implikasi dari perubahan paradigma atau perspektif ini adalah perubahan pada tanggungjawab organisasi, kebijakan serta prosedur (Smith, 2007).

Organisasi Kearsipan. Terma organisasi kearsipan dalam penelitian ini akan disintesakan dari konsep organisasi dan kearsipan. Organisasi adalah entitas sosial yang memiliki tujuan, struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi, serta terhubung dengan lingkungan eksternal (Daft, 2010). Dalam pada itu, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip (Pasal 1 nomor 1, UU No.43/2009) (Republik Indonesia, 2009). Kearsipan disini yang dalam perspektif luas dapat berarti penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya (Pasal 1 nomor 24, UU No.43/2009). Berdasarkan uraian ini organisasi pengelola arsip merujuk pada organisasi. Organisasi kearsipan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai entitas sosial yang memiliki tujuan, struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi dalam menjalankan kegitan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip serta terkoneksi dengan lingkungan eksternal. Organisasi menjadi penting karena (Daft, 2010, p. 14):

a. Mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dan manfaat;
b. Memproduksi barang dan jasa secara efisien;
c. Memfasilitasi inovasi;
d. Memanfaatkan perangkat modern dan teknologi informasi;
e. Menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan dan pekerja;
f. Mengakomodasi segala tantangan yang tengah terjadi baik itu berkenaan dengan isu keragaman, etika, motivasi dan koordinasi para pekerja

Sibernetika Parsons. Elemen mendasar organisasi bukanlah bangunan atau pun serangkaian regulasi, melainkan manusia dengan segala kompleksitas interaksi diantara mereka (Daft, 2010, p. 11). Karena dia adalah interaksi maka dia juga adalah sekumpulan tindakan antar manusia yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk meraih tujuan tertentu, maka dengan meminjam kerangka Parsons, pola tindakan ini dapat dijelaskan melalui skema Hierarki Sibernetika Sistem Tindakan Manusia (*Cybernetic Hierarchy of the System of Human Action*) (Parsons, 1978; Parsons, 1972; Parsons, 1991; Ritzer, 2011; Weinstein, 1974).

Sistem sibernetika ini secara sederhana dapat dilihat apda Gambar 1. Hierarki Sibernetika Sistem Tindakan Manusia berikut ini.




**Gambar 1**. Skema Hierarki Sibernetika Sistem Tindakan Manusia
Sumber. diadaptasi dari Trevino, 2001

Proses ini berlangsung secara sibernetik ibarat efek domino, sistem kultural menyuplai paradigma yang memberikan kerangka orientasi sebagai informasi bagi sistem sosial, dalam sistem sosial ini kemudian informasi ini dikelola sedemikian rupa hingga menjadi norma yang mengatur peran individu dalam sistem itu, norma peran lantas ini menyuplai informasi yang mengendalikan motivasi dan proses pengambilan keputusan bagi dalam sistem personalitas individu, yang lantas dieksekusi oleh sistem organismik/perilaku individu (Trevino, 2001).

Proses ini lantas berbalik dalam proses alur energi dari sistem organismic/ perilaku ke sistem personalitas kemudian ke sistem sosial dan menuju puncak ke sistem kultural sehingga skema sistem ini semakin kuat bertahan (Trevino, 2001). Pada posisi ini, sistem kultural memiliki pengaruh besar dalam terjadinya perubahan pada sistem sosial (Parsons, 1991, p. 330).

Pola pikir sibernetika ini akan peneliti jadikan sebagai panduan dalam melakukan analisa terhadap keseluruhan proses penelitian ini. Tapi bukan dalam artian menduplikasi total melainkan memodifikasi konsep-konsep kunci dan kemudian menyesusaikannya dengan kondisi lapangan.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Pasal 1 (1), Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Meminjam alur pikir sibernetika, perspektif pengelolaan arsip yang digunakan membentuk rumusan fungsi organisasi kearsipan. Fungsi organisasi kearsipan ini membentuk sistem pengelolaan arsip digital yang dijalankan. Dinamika keseluruhan ini berinteraksi dengan konteks SPBE yang mewujud sebagai *smart city* di IBU KOTA NUSANTARA nantinya. Lebih jelas, alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Kerangka Pikir berikut ini.




**Gambar 2**. Kerangka Pikir
Sumber. data temuan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dari Januari hingga Desember 2020. Namun, untuk penyegaran, peneliti meremajakan beberapa data dan literatur. Lebih jauh, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan *focus group discussion* (FGD).

Teknik analisa yang digunakan adalah seleksi, reduksi, kategorisasi dan konseptualisasi. Peneliti melakukan pengumpulan data kemudian melakukan seleksi dengan melakukan reduksi terhadap data yang kurang relevan. Berdasarkan reduksi ini selanjutnya, data yang relevan kemudian dikategorisasi untuk selanjutnya dilakukan konseptualisasi dengan merujuk pada kerangka konsep yang sudah disusun oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evolusi Pengelolaan Arsip Digital: Perspektif, Fungsi dan Praktek

Medan tempur dunia digital saat ini jauh lebih kompleks dibanding dunia non-digital. Bergulirnya SPBE dan revolusi industri 4.0 membawa begitu banyak variasi dari mesin pencipta informasi digital dan jenis informasi digital yang diproduksi olehnya. Kendati demikian, arsip digital rentan dan rapuh. Kasus hilangnya 15841 data tes covid -19 di Inggris menjadi contoh paling gamblang betapa rentan dan rapuhnya arsip digital (Hern, 2020).

Sejauh ini, berbagai variasi informasi digital atau arsip digital itu dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis (Katuu S. , 2016):

1. *Document created using office applications*;(contoh: .doc, .pdf, .ppt dan lainnya)
2. *Records generated by business informations systems*; (contoh: e-budgeting, e-planning, sicakep, dan lainnya)
3. *Records in online and web-based environment*; (contohnya: website, googleform, social media seperti *twitter, facebook, youtube* dan sejenisnya.
4. *Electronic messages from communication system*; (contohnya: *email, whatsaap, line, zoom, googlemeet, googleclassroom* dan sejenisnya).

Dengan semakin kompleksnya dunia digital, pengelolaan arsip pun mengalami evolusi, setidaknya ada 3 fase evolusi yang terjadi dan ini berjalan paralel dengan perkembangan TIK (Katuu S. , 2012).

Fase 1: penggunaan *electronic document systems* (EDMS) dan *electronic records management systems* (ERMS) secara terpisah;

Fase 2: pengunaan *integrated electronic document and records management system* (EDRMS);

Fase 3: penggunaan *entreprise content management systems* yang didalamnya

*document, records, workflow bussines process, knowledge management* dikelola secara terpadu.
Belakangan kemudian, muncul *intelligent information management* sebagai evolusi lanjutan dari ECM (Mancini, 2021).

Dengan konstelasi yang berubah itu, perspektif pengelolaan arsip pun berubah. Secara sederhana, perspektif pengelolaan arsip digital dapat digambarkan dalam dua premis berikut ini (Hofman, 2012):

1. Proses *recordkeeping* harus diintegrasikan dalam proses bisnis untuk memastikan kelayakan penciptaan arsip;
2. Aturan dan ketentuan *recordkeeping* harus diikutsertakan semenjak tahap perencanaan dan perancangan dalam pengembangan sistem.

Secara konseptual, kedua premis ini selanjutnya diterjemahkan menjadi *recordkeeping informatics*. *Recordkeeping informatics* adalah pengelolaan dan pengolahan arsip (*recorded informations*) yang ditangkap, disimpan dan digunakan sebagai bukti oleh para agensi (pencipta arsip) melalui perangkat teknologi informasi (Frank Upward Barbara, 2013, p. 38). Agensi (pencipta arsip) ini baik berupa organisasi, person maupun sistem informasi itu sendiri. Paradigma ini menyediakan jembatan bagi arsiparis dan pekerja bidang sistem informasi (Frank Upward Barbara, 2013, p. 38; Anderson, 2015).

Dengan perspektif yang seperti ini, kemudian fungsi pengelolaan arsip menjadi melekat dengan tata kelola TIK dan informasi (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, 2017). Dengan begitu, trend yang sudah muncul sejak 2007 ini, banyak organisasi yang kemudian membangun sebuah bidang di dalam Unit TIK yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TIK yang didalamnya pengelolaan arsip digital menjadi bagian yang penting (Sunberg & Wallin, 2007). Hal ini dilakukan agar semenjak sebuah sistem TIK direncanakan dan dikembangkan ketentuan-ketentuan *recordkeeping* dapat serta pula diinjeksikan.

Praktek pengelolaan arsip pun tidak lagi fokus pada arsip sebagai obyek, melainkan arsip sebagai sebuah produk hasil dari ketemalian berbagai proses dalam sistem TIK maupun yang mempengaruhinya. Terdapat tiga area dalam praktek pengelolaan arsip digital yang harus dicermati kemudian (ISO , 2014):

1. Konteks: Kondisi di dalam maupun di luar organisasi yang mempengaruhi arsip.
2. Sistem pengelolaan arsip: Sistem informasi yang dapat menangkap, mengelola dan menyediakan akses arsip sepanjang waktu.
3. Proses arsip: Seperangkat kegiatan melalui mana arsip diciptakan, dikendalikan, digunakan, disimpan dan disusutkan oleh organisasi bersangkutan.

*Konteks*. Pengelola arsip harus jeli memperhatikan perubahan yang terjadi pada sisi eksternal, salah satunya, perubahan legislasi dan regulasi yang berdampak pada ketentuan pengelolaan arsip. Selain itu pula, pengelola arsip juga sepatutnya cermat dalam menginvestigasi perubahan yang terjadi pada sisi internal, salah satunya, ketika ada perubahan pada struktur maupun fungsi organisasi dalam beberapa tahun terakhir.

*Sistem pengelolaan arsip.* Pada sisi desain, pengelola arsip selayaknya jeli melihat salah satunya mengenai kecocokan dan kelayakan teknologi yang dipilih dari segi ukuran, kompleksitas dan kegiatan organisasi. Pada sisi pemeliharaan, pengelola arsip juga sangat perlu untuk cermat menganalisasi salah satu persoalan, misalnya, tentang keterpantauan dan pendokumentasian kegagalan dan ketidakfungsionalan teknologi yang berdampak pada bekerjanya sistem pengelolaan arsip. Pada sisi keberlanjutan, pengelola arsip mestilah memantau salah satu masalah, seperti keteraturan peninjauan terhadap jaminan kualitas sistem pengelolaan arsip untuk mengidentifikasi pembaharuan atau perubahan lain dalam ketentuan pengelolaan arsip. Pada sisi

*interoperability*, pengelola arsip selayaknya teliti berkenaan dengan permasalahan, salah satunya tentang seberapa jauh ketergantungan sistem pengelolaan arsip terhadap sumber daya eksternal atau sistem lain, termasuk layanan seperti penyimpana awan (*cloud*). Pada sisi keamanan, pengelola arsip sebaiknya pula cermat menganalisa salah satunya mengenai, sejauhmana kebijakan keamanan informasi organisasi termasuk juga keamanan untuk arsip, proses arsip dan sistem pengelolaan arsip.

*Proses arsip*. Pada sisi desain, pengelola arsip selayaknya peduli misalnya, seberapa jauh mekanisme dalam desain yang ada mendokumentasikan semua penggunaan arsip aktivitas organisasi. Pada sisi penciptaan, pengelola arsip semestinya peka terhadap, salah satunya, sejauahmana penciptaan dan penangkapan arsip terintegrasi dengan proses bisnis atau rekat dengan penyelesaian transaksi kegiatan. Pada sisi metadata, pengelola arsip peka dalam menginvestigasi, salah satunya, sejauhmana spesifikasi metadata (termasuk spesifikasi teknis) terdokumentasi dan dapat diakses untuk diperbaharui. Pada sisi penggunaan, pengelola arsip selayaknya cermat memastikan, salah satunya, sejauhmana izin pengguna untuk menciptakan, menangkap, mengakses dan mengubah arsip, terkelola dengan baik dalam sistem itu. Pada sisi pemeliharaan, pengelola arsip selayaknya cermat memastikan, salah satunya, sejauhmana proses untuk mempertahankan keandalan dan autentisitas arsip dari waktu ke waktu (misalnya, keamanan dari akses atau modifikasi yang tidak sah), didokumentasikan, dan dipantau. Pada sisi penyusutan, pengelola arsip selayaknya cermat untuk memastikan, salah satunya, sejauhmana proses untuk memastikan penghancuran arsip yang tuntas, mencegah terjadinya pemulihan terhadap arsip baik yang berasal dari perangkat elektronik dan media penyimpanan elektronik tertentu.

Dalam konteks digital, tujuan praktek kearsipan adalah keberlanjutan autentisitas arsip (Anderson, 2015). Keberlanjutan autentisitas arsip adalah keberlanjutan kualitas arsip sejak dia diciptakan, kebal dari kerusakan dan kecacatan (Duranti & Blanchette, 2004). Keberlanjutan autentisitas ini bukan bersifat tunggal berkenaan dengan arsip itu sendiri melainkan konsekuensi dari hubungan berbagai hal yang mempengaruhi arsip tersebut (Rogers, 2015).

Maka tidak heran, intervensi pengelolaan arsip dalam konteks digital menjadi meluas. Intervensi sudah dilakukan semenjak sebuah sistem informasi direncanakan dan dikembangkan. Karena semua arsip digital adalah produk dari sistem informasi maka kualitas arsip digital sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang memproduksi dan mengelolannya (Borglund E. , 2006). Tentunya, untuk dapat membayangkan praktek pengelolaan arsip digital yang sedemikian itu dibutuhkan perubahan perspektif. Tanpa perubahan perspektif, akan sulit membayangkan sebuah praktek pengelolaan arsip yang sedemikian luas dan komprehensif itu.

**Pengelolaan Arsip Digital di Indonesia Saat ini: Perspektif, Fungsi dan Praktek**

Pendeskripsian kondisi pengelolaan arsip di Indonesia dalam konteks ini terbatas pada kondisi pengelolaan arsip di instansi pemerintah secara umum. Pemetaan perspektif, metode dan praktek akan memberikan gambaran kesenjangan antara evolusi pengelolaan arsip digital yang telah terjadi dengan apa yang dilakukan di Indonesia.

Perspektif pengelolaan arsip digital berkaitan dengan berkembangannya teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian diadopsi sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Percepatan penyelenggaraan pengelolaan arsip digital sesuai Perpres tentang SPBE Nomor 95 Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi publik. Dalam posisi ini, implementasi aplikasi umum untuk manajemen arsip elektronik sedang dikembangkan oleh arsip nasional dan saat ini sudah

disosialisasikan untuk diimplementasikan. Instansi pemerintah nantinya akan diwajibkan untuk menerapkan aplikasi ini. Dengan begitu, keseluruhan sistem yang tersebar di seluruh instansi pemerintah akan dapat terintegrasi. Kemudian, untuk menjalankan aplikasi dengan lancar, disusun Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Upaya mengintegrasikan sistem pengelolaan arsip tersebut dioperasikan oleh aktor-aktor berikut ini:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: bertindak sebagai koordinator nasional dan menetapkan kerangka kerja nasional;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika: berperan dalam menyelenggarakan infrastruktur digital (pusat data nasional berbasis *cloud*) agar implementasi aplikasi umum pengelolaan arsip elektronik dapat berjalan secara berkesinambungan.
3. Badan Siber dan Sandi Nasional: berperan dalam menjamin keamanan informasi melalui enkripsi;
4. Arsip Nasional Republik Indonesia: berperan dalam mengembangkan kerangka kerja dan menerapkan kebijakan pengelolaan arsip elektronik melalui aplikasi umum pengelolaan arsip elektronik;

Pada satu sisi konsep aplikasi umum pengelolaan arsip elektronik yang semodel dengan EDRMS membuat perhatian instansi pemerintah terhadap pengelolaan arsip menjadi semakin kuat. Namun, disisi lain, perspektif administrasi yang digunakan membuat pengelolaan arsip menjadi sempit sebatas persuratan dan naskah dinas. Perspektif administrasi mengidentikan pengelolaan arsip dengan administrasi perkantoran yang bersifat rutin klerikal. Pekerjaan klerikal disini diartikan sebagai pekerjaan berulang keseharian dan bagian dari penyediaan dukungan kantor. Bailey (2008) menyebutnya obsesi yang buta terhadap EDRMS (tanpa perubahan perspektif) hanya membuat kerja pengelolaan arsip menjadi *intellectually-sterile*, *vendor-led profession.*

Kendati pun, pengintegrasian urusan kearsipan dengan teknologi informasi sudah berkembang namun kerangka yang digunakan masih tetap administrasi perkantoran. Hal ini terungkap ketika FGD 12 Agustus 2020. Narasumber dari ANRI, A dan B mengemukakan bahwa nantinya unit pengelolaan arsip berada dibawah unit seperti pusat data dan informasi. Namun, menurut A dan B tersebut, menegaskan kembali ketika semua hal sudah menggunakan aplikasi lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pekerja arsip/arsiparis nanti? Selanjutnya, A dan B juga mengemukakan permasalahan, bagaimana dengan bentuk organisasi selama ini dengan jenjang yang begitu rupa.

Hingga saat ini, kendati dalam konteks digitalisasi, fungsi yang digunakan untuk menjalankan perspektif administrasi perkantoran ini adalah dengan menempatkan unit organisasi yang mengelola arsip dalam kekuasaan unit kesekretariatan atau urusan umum. Kini pun mayoritas instansi pemerintah melakukan hal tersebut. Alhasil, praktek pengelolaan arsip pun lebih banyak mengenai perkara fasilitatif klerikal dan teknis. Jika pun menggunakan aplikasi pengelolaan arsip digital atau elektronik yang terjadi adalah mekanisme klerikal adminitratif yang didigitalkan. Tanda paling jelas yang dapat merepresentasikan praktek klerikal administratif ini adalah dominannya penggunaan konsep atau kata seperti tertib, naskah dan persuratan.

## Konsep IBU KOTA NUSANTARA: Transformasi Organisasi dan Arsip Digital

IBU KOTA NUSANTARA secara resmi dinamakan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pada pasal 3 bahwa prinsip Ibu Kota Negara salah satunya adalah kota cerdas. Kota cerdas" adalah prinsip yang bertujuan menciptakan kota yang

nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis, dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi (Pasal 3 Ayat 2, penjelasan huruf g, UU No.3/2022) (Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya, deskripsi pada bagian ini sepenuhnya diadaptasi dari Diskusi Terbatas-Rapat IKN Bapenas via Zoom, 27 Agustus 2020.

IKN menjadi momentum bagi penataan sistem. Struktur dan proses bisnis pemerintahan yang lincah, adaptif dan akuntabel menjadi sasarannya. Dalam mewujudkan kondisi itu, akan dilakukan reformasi pada tiga aspek berikut ini:

1. Struktur organisasi yang fleksibel dan akuntabel.
   Penghapusan lembaga yang tidak produktif dan efektif serta tumpang tindih. Penghapusan eselon 3,4 dan 5 dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Pembangunan struktur organisasi matriks berbasis *outcome*.
2. Proses bisnis yang sederhana.
   Simplifikasi proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengadaan barang/jasa, monitoring dan evaluasi. Penetapan sistem pengawasan. Mendorong implementasi e-services.
2. Tata kelola digital
   Kebijakan SPBE untuk mewujudkan *smart government*: mendorong penerapan satu data, optimalisasi penggunaan SPBE dalam tata kerja, penggunaan *Internet of Things* (IoT), *big data*, *Artificial intelligent* (AI), pembangunan infrastruktur TIK yang *fully* digital dan yang terintegrasi serta dapat akses seluruh K/L/D.

Pada intinya, IBU KOTA NUSANTARA mengusung konsep digitalisasi proses bisnis pemerintahan. Melaluinya segala kerja dan aktivitas pemerintahan akan berproses dalam kompleksitas keterhubungan berbagai sistem informasi. Dampaknya berbagai variasi arsip digital akan tercipta. Maka dibutuhkan skema pengelolaan arsip digital yang tidak seperti biasa agar kontekstual dengan kondisi yang ada.

Kondisi ini berarti mensyaratkan adanya transformasi pada organisasi pengelola arsip agar siap tanggap dalam situasi yang demikian tersebut. Karena organisasi krusial sebagai badan yang akan menjalankan skema pengelolaan arsip digital yang dalam konteks demikian itu tentunya adalah informasi digital. Transformasi mendasar yang meliputi perspektif, fungsi dan praktek pengelolaan arsip digital.

**Sibernetika: Perspektif, Fungsi dan Praktek Pengelolaan Arsip Digital**

Dalam melihat segala permasalahan ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sibernetika parsons yang dikonsepkan oleh tokoh sosiologi klasik amerika yang sangat berpengaruh bahkan hingga saat ini, Talcot Parsons. Dalam sibernetika parsons, tindakan seseorang atau sekelompk orang ditentukan mulai sejak kerangka kultural, social, personality hingga ke tindakan. Kerangka kultural A akan menghasilkan tindakan A yang berbeda dengan orang yang menggunakan kerangka kultural B. Maka untuk mengganti tindakan, yang harus dilakukan adalah mengganti kerangka kultural. Pola tersebut peneliti adaptasi menjadi sibernetika tindakan pengelolaan arsip yang terdiri dari 3 lapis, perspektif, fungsi dan praktek pengelolaan arsip. Perspektif berisi asumsi konseptual tentang arsip, fungsi berisi penempatan posisi pengelolaan arsip dalam struktur organisasi, praktek berisi tentang kegiatan dan tindakan pengelolaan arsip di level lapangan.

Penjelasan awal akan dilakukan dengan menganalisa temuan pada subbab Pengelolaan Arsip Digital di Indonesia Saat Ini. Secara sibernetika, perspektif administrasi perkantoran yang dijadikan panduan membuat fungsi organisasi pengelola arsip pada instansi pemerintah mayoritas berada di bawah unit atau biro umum, bukan unit pengelola informasi. Fungsi yang demikian kemudian membuat

praktek pengelolaan arsip sebagai kegiatan teknis administratif yang fokus pada penataan arsip (baca: naskah dinas) secara tertib agar lebih mudah ditemukan. Pun ketika penggunakan teknologi digital dimasukkan dalam skema teknis-administratif ini, kerja pengelolaan arsip tidak beranjak. Perubahan yang terjadi masih sebatas penggunaan alat digital dalam bekerja. Pekerja arsip pada posisi ini kemudian masih terbatas dipandang sebagai operator alat digital tersebut.

Penjelasan selanjutnya akan dilakukan dengan menganalisa temuan pada subbab Evolusi Pengelolaan Arsip Digital. Analisa ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsepsi transformasi digital yang perlu untuk dikembangkan oleh para pemangku kepentingan khusunya ANRI demi organisasi pengelola arsip yang kontekstual dengan skema IBU KOTA NUSANTARA.

Secara sibernetika, perspektif *recordkeeping informaticss* yang diimplementasikan dalam melihat arsip, membuat fungsi organisasi pengelola arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari unit pengelola informasi (digital) sebuah organisasi. Fungsi yang demikian tersebut membuat praktek pengelolaan arsip digital berfokus pada asset informasi dengan tujuan memastikan keberlanjutan (sistem) informasi.

Perbandingan secara lebih sederhana dan jelas mengenai pengoperasian perspektif aktual yang diadopsi Indonesia saat ini dengan konsepsi yang ditawarkan secara sibernetika dapat dilihat pada tabel 1. Sibernetika Pengelolaan Arsip berikut.

**Tabel 1.** Sibernetika Pengelolaan Arsip

| No. | Elemen | Deskripsi | |
|---|---|---|---|
| | | **Saat ini** | **Konsep Usulan** |
| 1 | Perspektif | Dominan administrasi per-kantoran | *Recordkeeping informatics* |
| 2 | Fungsi | Menyatu dengan unit adminis-trative: Terlepas dari skema pengelolaan informasi digital organsasi yang luas | Menyatu dengan unit pengelola informasi digital: Terintegrasi dengan skema pengelolaan informasi digital organisasi yang luas |
| 3 | Praktek | Tertib administasi. fokus ke *Doc-ument created using office appli-cations (Word, Powerpoint, Excel etc)*. Terlepas dari skema pengel-olaan informasi digital organisasi yang luas;<br>Arsip dilihat sebagai obyek. | Kesinambungan informasi yang autentik; fokus pada kapabilitas pengelolaan. Hal ini berarti sebanyak mungkin mengelola berbagai wujud arsip digital.<br>Arsip dilihat sebagai proses atau pengarsipan. |

Sumber: data temuan

Ketika kondisi saat ini terus dipertahankan maka berbagai risiko negatif dapat terjadi ke berbagai pihak, setidaknya bagi organisasi yang bersangkutan, organisasi dan profesi kearsipan serta bagi lembaga kearsipan.

Bagi organisasi yang bersangkutan. Karena fokus pada naskah dinas maka arsip digital bentuk lainnya akan relatif terbengkalai. Selanjutnya, potensi organisasi untuk kehilangan aset informasi akan relatif lebih besar.

Bagi organisasi dan profesi kearsipan. Karena berorientasi pada kerja-kerja klerikal administratif, maka potensi untuk terjadinya delegitimasi terhadap organisasi maupun profesi kearsipan sangat besar. Pasalnya, kerja-kerja klerikal administratif merupakan pekerjaan yang diproyeksikan akan punah akibat digitalisasi

(katadata.co.id, 2017).

Bagi lembaga kearsipan. Karena bentuk arsip digital lain terbengkalai maka lembaga kearsipan berpotensi kehilangan beragam arsip digital bernilai historis dan kultural yang krusial bagi masyarakat maupun negara.

Dalam konteks yang demikian itu, sibernetika pengelolaan arsip ini memperjelas arah transformasi digital organisasi pengelola arsip dalam rangka IBU KOTA NUSANTARA. Sekaligus sibernetika pengelolaan arsip menegaskan bahwa transformasi digital organisasi pengelola arsip tidak dapat berjalan komprehensif tanpa terjadinya perubahan pada level perspektif. Karena level perspektif ini adalah dasar bagi terjadi perubahan pada level selanjutnya sebagai prinsip kerja sibernetika.

## KESIMPULAN

Merujuk pada analisa menggunakan sibernetika parsons, transformasi digital organisasi pengelola arsip yang kontekstual dengan konsep IBU KOTA NUSANTARA sangat bergantung pada perubahan perspektif. Maka, konsepsi transformasi digital organisasi pengelola arsip yang ditawarkan melalui riset ini adalah transformasi dari perspektif administrasi perkantoran ke *recordkeeping informaticss*, dari fungsi administratif ke pengelolaan informais digital, dari praktek tertib administrasi ke penjaminan kesinambungan informasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan buku


Anderson, K. (2015). Building Trust and Confidence Through Sustainable Information System Research: Towards a Common Future. *INFuture 8671.* Zagreb: INFuture 2015.

Bailey, S. (2008, April 22). Retrieved from the 2008 Records Management Society Conference: https://docs.google.com/document/pub?id=1HAvmy87baTm6h0R3_eEgAKz1mK1YwbYviiefUEZSpDs

Bawono, H. (2017). Simplifikasi Ke-arsip-an Elektronik: Akar Terseoknya di Indonesia dalam Belantara E-Government. In S. H. Harry Bawono, *Diskursus Kearsipan Indonesia: Sebuah Bunga Rampai* (pp. 5-76). Depok: Rajawali Press.

Bawono, H. (2018). Integrasi Recordkeeping Dalam Tata Kelola Teknologi Informasi: Belajat Strategi Adaptasi dari Swedia untuk Indonesia. In H. B. Sari Hasanah, *Diskursus Kearsipan Indonesia 2: Sebuah Bunga Rampai* (pp. 57-104). Depok: Rajawali Press.

Bearman, D. (1993). Record-Keeping Systems. *Archivaria*(36), 16-36.

Borglund, E. (2006). *A Predictive Model for Attaining Quality in Recordkeeping.* Sundvall: Mid Sweden University.

Borglund, E. (2008). *Design for Recordkeeping: Areas of Improvement.* Sundvall: Department of Natural Sciences, Mid Sweden University.

Borglund, E. A. (2007). RQAM: A recordkeeping quality assessment model. *International Journal of Information Quality, 1*(3), 326-344. Retrieved July 26, 2018

Cook, T. (2007, March). Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-Modernist Era. *Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research , 7*(0), 418.

Daft, R. L. (2010). *Organization Theory and Desig* (Tenth ed.). Ohio: South-Western Cengage Learning.

Dinitzen, H. B., & Jensen, L. K. (2010). *Organisational Theory - a practical approach.* (C. Luxford, Trans.) Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Duranti, L. (2001). Concepts, principles, and methods for the management of electronic records. *The Information Society, 73*, 271–279.

Duranti, L., & Blanchette, J.-f. (2004). *The Authenticity of Electronic Records: The InterPARES Approach.* Vancouver: The InterPARES.

Frank Upward Barbara, R. G. (2013). Recordkeeping Informatics: re-figuring a discipline in crisis with a single minded approach. *Records Management Journal, 23*(5), 7[1]-50.

Hern, A. (2020, Oktober 6). *Health Policy*. Retrieved from the guardian: https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/05/how-excel-may-have-caused-loss-of-16000-covid-tests-in-england

Hofman, H. (2012). Rethinking the archival function in the digital era. *ICA Congress 2012.* Brisbance: ICA.

ISO . (2014). ISO/TR 18128 Information and Documentation – Risk Assesment for Records. ISO.

Katuu, S. (2012). Enterprise Content Management (ECM) Implementation in South Africa. *Records Management Journal, 88*(1), 37-56. doi:http://dx.doi.org/10.1108/09565691211222081

Katuu, S. (2016). Managing Digital Records in a Global Environment: A Review of the Landscape of International Standards and Good Practice Guidelines. *The Electronic Library* , 869-894.

Kingdon, T. N. (2012). *Managing Digital Records without an Electronic Records Management System.* London: Crown.

Mancini, J. (2021). *The Next Wave: Moving from ECM to Intelleget Information Management.* Maryland: AIIM. Retrieved July 6[2], 6466, from https://cdn2.hubspot.net/hubfs/332414/AIIM_Blog/Intel-info-Next-Wave-2017-updated.pdf

Nurmaningsihdkk, D. (2016). *Kajian Archival Management Plan di ANRI.* Jakarta: Direktorat Pengolahan.

Parsons, T. (1972, September). Culture and Social System Revisited. *Social Science Quarterly, 53*(2), 253-266.

Parsons, T. (1978). *Action Theory and The Human Condition .* New York: The Free Press.

Parsons, T. (1991). *The Social System* (2nd ed.). (B. S. Turner, Ed.) London: Routledge.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. (2017). *Kajian Tata Kelola e-Arsip.* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Rogers, C. (2015). Authenticity of Digital Records in Practice. *8671 Digital Heritage* (pp. 7-10). Granada: IEEE.

Rustam, M. (2014). *Modul I: Pengantar Pengelolaan Arsip Elektronik.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Smallwood, R. F. (2013). *Managing Electronic Records. Methodds, Best Practices, and Technologies.* New Jersey: John Wiley& Sons, Inc.

Smith, K. (2007). *Planning and implementing electronic records management : a*

*practical guide.* London: FaceT Publication.

Sunberg, H. P., & Wallin, P. (2007). Recordkeeping and Information Architecture: a Study of the Swedish Financial Sector. *International Journal of Public Information Systems*(1), 31-45.

Svard, P. (2017). *Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst e-Government Development.* Cambridge: Elsevier.

The National Archives. (2010). *Guide 8: Organisational arrangements to support records management.* London: The National Archives.

Trevino, A. J. (2001). The Theory and Legacy of Talcott Parsons. In *Talcott Parsons: His Theory and Legacy in Contemporary Sociology* (p. xix). Maryland: Rowman & Littlefield Publisher.

Weinstein, M. A. (1974). Creativity and the Cybernatic Hierarchy: Two Models of the Human Condition. *Social Science, 05*(1), 11-18.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara RI Tahun 2009.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

*Web Page*

Deny, S. (2019, Mei 31). *Ekonomi*. Retrieved from Liputan6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3980834/wawancara-khusus-menteri-bambang-ibu-kota-baru-jadi-identitas-bangsa

Hern, A. (2020, Oktober 6). *Health Policy*. Retrieved from the guardian: https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/05/how-excel-may-have-caused-loss-of-16000-covid-tests-in-england

katadata.co.id. (2017, April 26). *databoks.katadata*. Retrieved from katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/pekerjaan-apa-yang-tergerus-kemajuan-teknologi